

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Alfira Rhamadiva Damayanti¹, Muhammad Ardiansyah²

¹Universitas Bandar Lampung

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 2024

Revised April 2024

Accepted April 2024

Available online April 2024

Kata Kunci:

Implementasi; Program Sekolah Ramah Anak

Keywords:

Implementation; Child Friendly School Program



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Bandar Lampung.

mengenai program SRA. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif dan tergolong penelitian kualitatif. Organisasi, interpretasi, dan penerapan/implementasi adalah tiga aspek teori Charles O. Jones yang digunakan dalam penelitian ini. Dari sudut pandang organisasi dan interpretasi, temuan-temuan studi ini cukup kuat, namun dari sudut pandang implementasi, masih ada kekurangan.

ABSTRACT

Regarding the Child Friendly School Policy, namely schools established to ensure that children feel safe and protected from acts of violence that occur in the school environment, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection issued Ministerial Regulation Number 8 of 2014. The Government's Child Friendly School Program (SRA) is responsible to implement this strategy. Knowing the advantages and disadvantages of the program, as well as the ideas behind the use of the SRA program in preventing child violence in Bandar Lampung City, is the main objective of this research. Problems that emerged during program implementation included facilities that did not meet SRA standards, a lack of outreach efforts from the Women's Empowerment and Child Protection Service, and a lack of training for teaching staff, resulting in many students still being confused about the SRA program. This research uses a descriptive research strategy and is classified as qualitative research. Organization, interpretation, and application/implementation are the three aspects of Charles O. Jones's theory used in this research. From an organizational and interpretation perspective, the findings of this study are quite strong, but from an implementation perspective, there are still shortcomings.

1. PENDAHULUAN

Anak seringkali didefinisikan sebagai seseorang yang masih dalam tahap pertumbuhan baik secara fisik, mental, dan emosional. Anak merupakan generasi masa depan negara yang mengemban tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa yang lebih maju di masa depan, maka sangat penting bagi mereka agar dapat kesempatan untuk mengembangkan mental, fisik, dan kondisi emosionalnya dengan baik. Pembangunan nasional Indonesia menitikberatkan pada anak sebagai subjek

*Corresponding author

E-mail addresses: alfirahamadivaaa@gmail.com



dan tujuan agar dapat menciptakan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Seorang anak mempunyai hak untuk meningkatkan potensi dirinya secara optimal tanpa takut akan adanya kekerasan. Oleh karena itu, pemberdayaan anak sangat penting dan perlu dilakukan agar setiap anak dapat mengembangkan kepribadian dan rasa percaya diri serta memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini tugas dan kewajiban bagi suatu negara untuk menjaga dan melindungi generasi muda dari hal-hal buruk seperti tindak kekerasan dan diskriminasi.

Guru mempunyai kekuatan untuk memberikan pengalaman negatif, seperti kekerasan, kepada siswanya, khususnya di dalam kelas, siswa ataupun orang tua. Tindak kekerasan dan diskriminasi di sekolah ini sangat melanggar etika dan peraturan pendidikan. Pelanggaran terhadap peraturan sekolah dan etika pendidikan bagi guru dan pemangku kepentingan dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kriminal. Namun ironisnya dalam rentang waktu 5 tahun (2017-2022), terdapat total 3.902 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan pada anak di Indonesia masih merajarela, terutama pada saat di sekolah.

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Anak di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2017	428
2018	451
2019	321
2020	1567
2021	594
2022	541

Sumber: Bankdata.kpai.go.id & Simfoni PPA (2022)

Terdapat dua jenis kekerasan yang dapat terjadi pada anak, yaitu berupa kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Kekerasan fisik yang sering terjadi pada anak-anak contohnya seperti mencubit, menarik, menendang, memukul dan melukai anak dengan tangan ataupun benda, dan memberikan hukuman pada anak hingga sakit atau pingsan. Sedangkan kekerasan verbal dapat berupa penghinaan terhadap teman atau murid, berteriak dengan keras dan kasar, menyebut seorang anak dengan kata "bodoh, malas, nakal", dan melakukan intimidasi seperti *bullying*.

Berdasarkan data dari Kementerian PPPA RI, sebanyak 645 kasus kekerasan pada anak terjadi di Provinsi Lampung dengan total 614 korban anak pada 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Banyaknya jumlah kasus kekerasan ini menyebabkan Provinsi Lampung berada pada peringkat empat belas terkait kasus kekerasan anak di Indonesia. Sedangkan di Kota Bandar Lampung terdapat 101 insiden yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Statistik kekerasan anak di Bandar Lampung tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

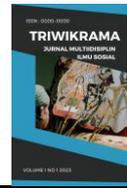
Tabel 1.1 Rincian Data Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Simfoni-PPA Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kekerasan	2021	2022	2023
1	Kekerasan Fisik/Penganiayaan	26	13	7
2	Kekerasan Seksual	59	55	67
3	Pembunuhan	1	1	0
4	TPPO/Trafficking	6	1	2
5	Penelantaran Anak	1	1	1
6	Kenakalan Anak/Bullying	4	2	1
7	Lainnya/Konseling	4	5	5
	Total	101	78	83

Sumber: Simfoni PPA Kota Bandar Lampung

Menjamin keselamatan anak, khususnya dalam konteks sekolah, merupakan tanggung jawab krusial Dinas PPPA Kota Bandar Lampung. Dedikasi pemerintah daerah dalam membangun lingkungan sekolah

Alfira Rhamadiva Damayanti / Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Kekerasan pada Anak di Kota Bandar Lampung



yang aman serta mendukung dan meningkatkan kesejahteraan anak terlihat pada Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Dinas PPPA Kota Bandar Lampung. Sebagai sebuah inisiatif proaktif, program ini dirancang untuk mencegah kekerasan pada anak, menciptakan atmosfer belajar yang positif, serta memberikan dukungan menyeluruh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kementerian PPPA mengeluarkan Permen PPPA No 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan SRA. Permen ini dibuat untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki rasa aman dan merasa terlindungi dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Prinsip-prinsip dasar SRA harus mencakup non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik anak, menghormati martabat dan sudut pandang anak, serta pengelolaan yang efektif untuk memberikan jaminan adanya keterbukaan informasi serta supremasi hukum di lingkungan pendidikan.

Pengurus daerah, anggota komite pengambilan kebijakan satuan pendidikan, dan keterlibatan aktif siswa dan keluarganya merupakan komponen penting SRA. Hukum dan kebijakan sekolah tidak boleh melanggar hak-hak anak, sekolah harus membuat kebijakan yang fokus pada penghapusan kekerasan terhadap siswa. Ini harus mencakup prosedur pengaduan hingga penanganan kasus. Tata tertib sekolah dapat mencegah, menangani, dan melindungi siswa dari kekerasan. Untuk membuat SRA, standarisasi untuk guru dan karyawan sangat penting. Tenaga kependidikan harus mendapatkan pelatihan tentang perlindungan hak anak dan SRA. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses implementasi program SRA di Bandar Lampung untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membantu dan menghambat kemampuannya dalam mencegah dan menghindari kekerasan terhadap anak.

2. METODE

Metodologi deskriptif kualitatif digunakan dalam penyelidikan ini. Sugiyono (2018) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama untuk mempelajari item-item di lingkungan alaminya. Pendekatan yang didasarkan pada analisis kualitatif, dengan fokus pada makna, digunakan untuk mengumpulkan data. Penyajian naratif penelitian kualitatif menekankan fokus metode pada kualitas. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mencari makna, arti, konsep, ciri-ciri, gejala, simbol, dan penjelasan terhadap suatu fenomena.

Penelitian dilakukan melalui observasi terhadap subjek penelitian, kemudian melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan, dan untuk keperluan dokumentasi peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dan sedang dilakukan untuk mendukung penelitian. Hasil wawancara, observasi dan dokumen yang dikumpulkan peneliti disajikan dalam bentuk dokumen, yang selanjutnya dikembangkan dan diimplementasikan berdasarkan teori yang telah ditetapkan. Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengimplementasian program SRA yang diterapkan oleh Dinas PPPA di Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur implementasi program SRA ini dengan menggunakan Teori Implementasi Program oleh Charles O. Jones seperti yang Disajikan dalam Suryana (2019:28) dengan tiga dimensi bagian yaitu sebagai berikut:

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dimaksud adalah pembagian struktur pelaksana kerja yang jelas untuk melaksanakan program dan memastikan bahwa staf pelaksana terdiri dari personel yang berkualitas.

2. Interpretasi

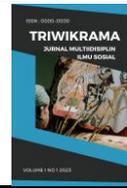
Dalam hal ini, hasil yang diharapkan hanya dapat dicapai jika tindakan yang direncanakan sesuai dengan arahan teknis dan implementasi.

3. Penerapan atau Aplikasi

Untuk menjamin program kerja yang direncanakan membuahkan hasil yang diinginkan, diperlukan metode yang jelas dalam aspek pelaksanaan atau pelaksanaan program.

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, kami akan mengumpulkan data kualitatif, yang didefinisikan sebagai data yang tidak bersifat numerik atau statistik. Membantu peneliti mengidentifikasi masalah dengan memberikan pemeriksaan terhadap keadaan objek saat ini. Data tekstual, data analitik, dan data kualitatif komprehensif merupakan tiga komponen utama. (teks tertulis atau transkripsi wawancara), data visual (gambar, foto, atau video), dan data suara (rekaman audio atau video). seperti informasi yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, artikel, dan sumber lainnya. Sumber informasi primer dan sekunder dimasukkan dalam penelitian ini.



a. Data primer

Data primer ini merupakan informasi yang berasal dari penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh sumber yang dapat diandalkan. Contoh sumber data primer seperti survei, wawancara, observasi langsung, eksperimen, dan penelitian lapangan.

b. Data sekunder

Peneliti sering kali mengandalkan sumber sekunder, seperti catatan dan bentuk dokumentasi lainnya, untuk mengumpulkan informasi yang sudah ada. Buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan subjek hukum ketenagakerjaan menjadi sumber sekunder penelitian ini.

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini yaitu dengan melalui wawancara terstruktur dan pengamatan lapangan terhadap informan yang telah ditetapkan dan juga dokumen-dokumen tambahan yang didapat dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini informan yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Divisi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pekerja Divisi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Para pengajar pada lembaga pendidikan yang telah menyelenggarakan Program Student Resource Advocate (SRA).
4. Anak yang sekolahnya telah mengadopsi Lingkungan Akademik Aman dan Tangguh (SRA).

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian sangat bergantung pada strategi pengumpulan data; lagi pula, mendapatkan data yang andal adalah inti dari melakukan penelitian. Berikut beberapa cara untuk mengumpulkan data tersebut:

1. Observasi

Jika dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya, observasi mempunyai beberapa ciri yang membedakan (Sugiyono, 2018). Manusia bukanlah satu-satunya hal yang dapat diamati; barang-barang alami lainnya mungkin juga. Peneliti dapat memperoleh wawasan tentang perilaku dan signifikansinya melalui keterlibatan dalam aktivitas observasi. Lebih lanjut disebutkan bahwa observasi merupakan kumpulan persepsi mengenai lingkungan luar yang diperoleh dari seluruh jangkauan kemampuan persepsi manusia.

2. Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi atau data, peneliti sering melakukan wawancara yang meliputi bertanya dan berinteraksi langsung dengan subjek. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi tidak terdokumentasi yang dapat dimodifikasi berdasarkan penjelasan informan dan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai berbagai informan kunci antara lain Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Staf Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, guru sekolah dan siswa yang pernah mengikuti kegiatan Ramah Anak. Program Sekolah (SRA), dan lain-lain.

3. Dokumentasi

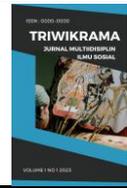
Mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber, seperti dokumen, catatan, atau catatan tertulis, dikenal dengan teknik pengumpulan data dokumenter. Banyak jenis studi, analisis, pelaporan, dan pemantauan lainnya yang dapat menggunakan dokumentasi data ini. Pengumpulan data dokumentasi adalah metode yang mengandalkan kertas (misalnya arsip, catatan) sebagai sumber informasi utamanya (Sugiyono, 2017).

Analisis Data

Metode untuk mengumpulkan informasi secara hati-hati yang diperoleh dari wawancara, catatan, dan sumber lain ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain dikenal sebagai teknik analisis data. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi analisis data yang dikenal dengan model Miles dan Huberman. Metode ini memiliki berbagai tahapan yang digunakan dalam analisis data, antara lain :

1. Reduksi Data

Memilah-milah, memusatkan perhatian, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang muncul dari catatan lapangan adalah inti dari reduksi data. Untuk mereduksi data, seseorang harus



merangkum, memilih dan memilih apa yang paling relevan, memusatkan perhatian pada poin-poin penting, dan mencari pola dan tema. Oleh karena itu, statistik yang disederhanakan dapat memberikan gambaran bagaimana program SRA dilaksanakan di Bandar Lampung.

2. Penyajian Data

Diagram alur, penjelasan singkat, bagan, dan korelasi antar kategori merupakan cara yang valid untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif. Rangkuman keseluruhan atau sebagian penelitian diberikan dengan menyajikan beberapa poin data. Penyajian data memudahkan pemahaman peristiwa dan, dari situ, perencanaan tindakan selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Saat menulis laporan penelitian atau artikel ilmiah, penting untuk menarik kesimpulan untuk merangkum hasil dan temuan penyelidikan. Laporan penelitian dan makalah ilmiah tidak lengkap tanpa bagian yang merangkum temuan dan hasil penelitian kesimpulan penelitian. Inti dari setiap proyek penelitian adalah kesimpulannya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan selama ini. Peneliti sekarang meninjau kembali catatan lapangan mereka dan menggunakan pendekatan teoretis untuk menguji ulang data guna memastikan data tersebut masih sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik Keabsahan Data

Pendekatan validitas data merupakan bagian dari metode pengumpulan data yang menggabungkan sumber data baru dan lama dalam upaya memverifikasi keaslian data. Peneliti menggunakan metodologi triangulasi untuk memastikan keandalan data mereka dalam penyelidikan ini. Ada berbagai pendekatan untuk triangulasi model, termasuk:

a. Triangulasi Sumber

Istilah "triangulasi sumber" mengacu pada praktik mengevaluasi dan membedakan keandalan data yang dikumpulkan dari banyak sumber. Contohnya termasuk membandingkan catatan wawancara dengan dokumentasi yang sudah ada sebelumnya, membandingkan pernyataan luas dengan rincian spesifik, atau membandingkan hasil observasi dengan wawancara.

b. Triangulasi Waktu

Karena perilaku manusia berkembang seiring berjalannya waktu, triangulasi waktu digunakan untuk menjamin keandalan data mengenai proses dan perubahan perilaku.

c. Triangulasi Metode

Tujuan dari metode triangulasi adalah untuk memastikan hasil penelitian sekokoh mungkin. Untuk melakukan triangulasi metode, diperlukan pengumpulan data yang sama dengan menggunakan banyak metode.

Dengan menggunakan metodologi triangulasi sumber, peneliti dalam penelitian ini memastikan bahwa data penelitian adalah valid. Istilah "triangulasi sumber" mengacu pada praktik mengevaluasi dan membedakan keandalan data yang dikumpulkan dari banyak sumber. Contohnya termasuk membandingkan catatan wawancara dengan dokumentasi yang sudah ada sebelumnya, membandingkan pernyataan luas dengan rincian spesifik, atau membandingkan hasil observasi dengan wawancara.

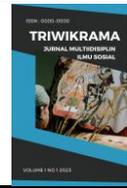
Lokasi Penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlokasi di Jl. Susilo No. 2 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung menjadi lokasi penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program SRA di Bandar Lampung

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan sebuah program yang bertujuan untuk merealisasikan lingkungan pembelajaran yang memiliki rasa aman dan nyaman, mendukung proses peningkatan diri seorang anak baik secara fisik, mental, maupun emosionalnya serta mampu melindungi anak dari perlakuan kekerasan. Beberapa konsep SRA, antara lain inklusivitas, keterlibatan anak, dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, didasarkan pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur kebijakan SRA. Berdasarkan wawancara yang telah ditentukan kepada pihak-pihak sebagai berikut: Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Dinas PPPA, staf pada divisi yang sama, dua orang guru dan dua orang siswa SMP N 3 Bandar Lampung, hasil pelaksanaan program SRA diturunkan. Ada beberapa bagian yang terlibat dalam menjalankan program SRA, antara lain:



1. Kebijakan SRA

Kebijakan SRA ini didasarkan pada sejumlah program yang bertujuan untuk mencegah dan menangani segala jenis kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memuat disiplin yang konstruktif dan tidak mengandung komponen yang melanggar hak anak. hak. Partisipasi dalam pelaksanaan program SRA ditujukan untuk menjamin perkembangan dan pengamanan anak di sekolah.

2. Orang-orang yang Bekerja di Bidang Pendidikan yang Dibimbing oleh KHA dan SRA

Guru dan pengelola yang bersertifikat Konvensi Hak Anak (CRC) dan Sekolah Ramah Anak (SRA) memastikan bahwa seluruh warga sekolah, termasuk orang tua, siswa, dan personel sekolah lainnya, berpartisipasi dalam pelatihan CRC dan sosialisasi SRA. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kompetensi tenaga pendidikan yang terkait dengan metode ramah anak, pelatihan KHA dan SRA sangat diperlukan.

3. Membangun pendekatan pendidikan yang kondusif bagi anak

Pendidikan berbasis hak peserta didik, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di seluruh sekolah, dan pengembangan perilaku positif melalui pengajaran, teladan, dan disiplin merupakan komponen dari proses pembelajaran ramah anak. Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu di sekolah merupakan salah satu tanda proses pembelajaran ramah anak.

4. Sarana dan Prasarana yang Ramah Anak

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, fasilitas kantin dan makanan yang memantau status kesehatan, serta papan nama SRA yang mengikuti standar atau desain yang berlaku merupakan contoh sarana dan prasarana ramah anak. Keamanan dan kenyamanan peserta didik serta keutuhan prasarana satuan pendidikan bergantung pada komponen ini.

5. Keterlibatan Anak

Dalam skenario ini, keterlibatan anak tidak hanya mencakup anak itu sendiri, namun juga siswa yang menjalankan program SRA. Para siswa ini mempunyai kebebasan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang benar-benar mereka minati, membantu membuat lingkungan kelas dan sekolah ramah, bahkan menjadi perwakilan sesama siswa dalam tim pelaksana SRA.

Peneliti mengukur implementasi program SRA ini dengan menggunakan Teori Implementasi Program yang dijelaskan oleh Charles O. Jones dalam Suryana (2019) dengan tiga dimensi bagian yaitu:

- a. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dimaksud adalah pembagian struktur pelaksana kerja yang jelas untuk melaksanakan program dan memastikan bahwa staf pelaksana terdiri dari personel yang berkualitas.

- b. Interpretasi

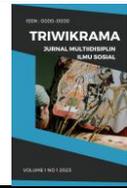
Pada dimensi ini program kerja yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sehingga hasil yang diinginkan bisa terealisasi.

- c. Penerapan atau Aplikasi

Dalam dimensi penerapan atau pengaplikasian sebuah program, diperlukan suatu prosedur kerja yang jelas agar program kerja yang dirancang dapat memberikan hasil yang baik.

Dimensi pertama dalam implementasi program SRA yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses merancang, mengembangkan, dan mengelola struktur organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian termasuk menentukan hal yang harus dilakukan, membagi siapa yang bertanggung jawab, menetapkan tingkat otoritas, dan membangun hubungan antara anggota organisasi. Pengorganisasian melibatkan pengelompokan orang-orang dan sumber daya lainnya dalam unit-unit yang berbeda sesuai dengan spesialisasi dan keahlian, serta menetapkan saluran komunikasi dan aliran kerja yang efisien. Tujuan pengorganisasian adalah untuk membuat struktur yang memungkinkan organisasi beroperasi secara efektif, mencapai tujuan, dan tetap fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan internal.

Dalam pengoperasian program, diperlukan struktur organisasi yang jelas agar tenaga pelaksana yang mengoperasikan program memiliki kemampuan yang baik dan sesuai serta berkualitas. pengorganisasian di sekolah yang sudah menerapkan program SRA belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya tim khusus yang secara eksplisit bertanggung jawab atas program SRA. Namun, terdapat upaya kolaboratif dari berbagai pihak sekolah seperti kepala sekolah, waka siswa, guru BK, dan OSIS yang turut terlibat dalam pemantauan dan implementasi program SRA.



Guru yang telah mengikuti pelatihan SRA dan memiliki pemahaman dalam menangani kekerasan memiliki peran penting dalam implementasi program SRA. Peran siswa juga dibutuhkan sebagai pelapor ketika menemukan masalah di sekolah. Karena siswa sering kali merahasiakan masalah yang terjadi, siswa harus berperan sebagai pelapor dan menjaga rahasia mereka dari siapa pun yang terlibat dalam program. Oleh karena itu sangat dibutuhkan tim khusus dalam penerapannya agar maksimal tepat sasaran, dan sesuai petunjuk serta standarisasi. Namun, masih perlu dilakukan atau dibentuk tim khusus untuk dapat menerapkan dan menjalankan program ini dengan baik serta memastikan keberhasilan dan efektivitas program SRA di sekolah.

Dimensi selanjutnya pada implementasi program SRA yaitu dimensi interpretasi. Pada dimensi interpretasi, pelaksana perlu memahami dengan jelas isi kebijakan dan program, makna kebijakan dan program, serta tujuan kebijakan dan program. Melalui hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerapan program SRA pada dimensi interpretasi sudah berjalan dengan baik karena kekerasan dalam bentuk fisik di sekolah sudah jarang ditemukan, kesadaran dan kepedulian guru terhadap murid dalam melakukan perlindungan terhadap kekerasan juga semakin meningkat. Meski begitu, banyak faktor yang harus dipikirkan agar program SRA dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, kurangnya fasilitas, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya kesadaran mengenai program, dan pertimbangan finansial.

Pada dimensi penerapan dan aplikasi, pengimplementasian program SRA dalam mencegah dan menghindari kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung masih belum bisa dikatakan baik. Hal ini dikarenakan fasilitas pada bidang kesehatan yaitu UKS masih belum lengkap dan memadai, seperti kelengkapan obat-obatan dan peralatan kesehatannya. Kurangnya perhatian pada pengelolaan perpustakaan di sekolah terkait update buku-buku yang mampu menarik perhatian siswa, sehingga jarang sekali siswa yang berkunjung dan membaca buku di perpustakaan. Dari hasil observasi peneliti mengenai toilet yang ada di sekolah juga masih kurang terjaga kebersihannya serta penerangan pada toilet masih sangat minim. Selain itu, kantin di sekolah masih banyak yang menyajikan makanan yang terbuat dari bahan instan, dan letaknya masih kurang strategis dikarenakan lingkungannya yang kurang bersih. Mengingat masih banyak dosen yang kebingungan dengan program SRA ini, maka diyakini dapat ditingkatkan dan dinilai, khususnya upaya sosialisasi Dinas PPPA.

Aspek Pendukung dan Aspek Penghambat Implementasi Program SRA di Bandar Lampung

A. Aspek Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang mendukung implementasi program SRA ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah

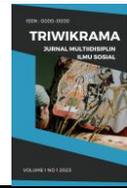
Dalam penerapan implementasi program SRA terdapat faktor pendukung salah satunya yaitu adanya peran pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan program SRA. Hal ini dapat berupa standar dan pedoman bagi sekolah agar dapat menyediakan area sekolah yang nyaman dan berguna untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan anak di sekolah.

2. Dukungan dari Stakeholder

Faktor pendukung yang sangat penting adalah peran dari Kepala Sekolah, Guru, dan juga Orang Tua. Tenaga pendidik harus memberikan sebuah dukungan dalam pengimplementasian program SRA dan berusaha untuk bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program SRA di sekolah, dukungan tersebut ditunjukkan dengan tindakan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar yang baik kepada anak tanpa melakukan kekerasan, memberikan anak hak mengungkapkan pendapat, selalu mengedukasi anak tentang kekerasan. Setiap anggota komunitas sekolah, terutama para pengajar, tunduk pada pengaruh kepala sekolah, sebagai pemimpin. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif memungkinkan tercapainya tujuan dan kualitas sekolah yang baik. Peran orang tua di rumah juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak. Oleh sebab itu, orang tua sangat diharapkan mampu memberikan contoh yang baik terhadap anaknya, memberikan perhatian dan dorongan terhadap pendidikan anak dan juga sikap peduli terhadap mental anak.

B. Aspek Penghambat

Selain adanya faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menghambat berjalannya program SRA ini, diantaranya yaitu:



1. Tidak Adanya Tim Khusus

Dalam pengoperasian program SRA belum adanya pembentukan seperti tim khusus. Implementasi Program SRA ini memerlukan pihak-pihak yang memahami konsep dasar SRA termasuk memahami psikologi perkembangan anak, apa yang mereka butuhkan saat belajar, dan betapa pentingnya membuat lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung untuk pertumbuhan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam Implementasi program SRA ini terdapat standarisasi yang harus dipenuhi seperti fasilitas yang menunjang keamanan bagi murid antara lain yaitu meja yang harus tumpul, makanan di kantin harus terbuat dari bahan yg sehat dan tidak boleh ada lagi makanan instant. Beberapa sekolah juga tidak mempunyai fasilitas yang lengkap secara keseluruhan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan dan menunjang proses belajar. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas dan peralatan sangat penting untuk menjalankan dan mengoptimalkan program SRA.

3. SDM yang kurang memadai

Salah satu tantangan besar menerapkan program SRA adalah kurangnya SDM yang memadai. Ketika SDM di sekolah tidak memadai, berbagai masalah dapat muncul yang menghambat pelaksanaan program. Seperti kurangnya pelatihan terhadap tenaga pendidik yang mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep dan tujuan dari program SRA. Ini dapat mengakibatkan kurangnya komitmen dalam menerapkan program tersebut dengan benar. Pemahaman yang kurang juga dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah atau kesulitan yang dialami siswa pada saat belajar. Agar semua pihak yang terlibat dalam penerapan program sekolah ramah anak mendapat informasi yang baik, penting untuk membentuk tim yang berdedikasi, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan. Dengan demikian, diharapkan program SRA dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perkembangan anak-anak dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi program SRA di Kota Bandar Lampung berdasarkan Teori Implementasi Program, pada bagian dimensi pengorganisasian masih belum berjalan dengan baik. Dalam pengorganisasian agar pelaksanaannya lebih maksimal dan sesuai dengan standarisasi diperlukan tim khusus yang lebih berkompeten dan memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan program SRA memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan. Pada dimensi interpretasi, Implementasi program SRA sudah berjalan dengan cukup baik. Setelah diterapkannya Program SRA ini sudah jarang ditemukan kasus kekerasan fisik di sekolah, kasus *bullying* mulai mengurang, dan juga anak murid aktif dalam pembelajaran maupun berorganisasi. Selanjutnya implementasi pada dimensi penerapan dan aplikasi masih belum berjalan dengan baik. Fasilitas yang ada masih belum sesuai dengan standarisasi program SRA yang sesungguhnya. Adapun faktor pendukung pada implementasi program ini yaitu peran pemerintah dan juga dukungan dari *stakeholder*. Terdapat juga beberapa faktor penghambat pada program ini yaitu tidak adanya tim khusus, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, serta kurangnya sdm yang memadai dalam implementasi program SRA ini.

Saran

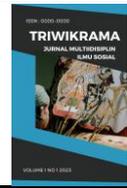
Ada beberapa rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan temuannya terhadap pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bandar Lampung. Rekomendasi tersebut antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Mendukung staf pengajar dalam memahami prosedur program SRA, memberikan pelatihan yang setara bagi staf pengajar, dan membantu sekolah dalam melengkapi fasilitas yang memenuhi standar SRA, semuanya merupakan tujuan dari upaya sosialisasi pemerintah terkait program SRA, khususnya Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, pemerintah diperkirakan akan membentuk tim pelaksana program khusus. Struktur organisasi yang sesuai dapat dibentuk untuk bertindak sebagai koordinator program SRA, dengan harapan bahwa individu ini akan menjamin kelancaran dan efisiensi pelaksanaan program.

2. Bagi Sekolah

Alfira Rhamadiva Damayanti / Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Kekerasan pada Anak di Kota Bandar Lampung



Guru diharapkan lebih proaktif dalam mencegah anak-anak melakukan tindakan kekerasan, sehingga anak-anak tidak akan menjadi korban atau pelaku kekerasan karena ketidaktahuannya tentang tindakan kekerasan. Guru diharapkan dapat berperan dalam membimbing siswa di sekolah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan SRA dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan anti kekerasan kepada seluruh warga sekolah, semua pihak yang terlibat, termasuk sebagai administrator, instruktur, anak, orang tua, bahkan petugas keamanan. Kita memerlukan lebih banyak hal positif yang terjadi dalam kehidupan anak-anak jika kita ingin mereka tumbuh menjadi orang yang percaya diri, mandiri, kreatif, bertanggung jawab, dan baik hati.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Charles O. Jones. (Siti. Erna Latifi Suryana, 2009: 28) Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dr. Drs. William Djani, M.Si. (2022). KEBIJAKAN PUBLIK (Dan Implikasinya Di era Otonomi Daerah): Penerbit Zifatama Jawara.
- Dr. Rusmilawati Windari, S.H., M.H. (2022). Kebijakan Formulasi Larangan Hukuman Fisik (Corporal Punishment) Pada Anak Dalam Lingkup Pengasuhan Dan Pendidikan (Kajian Integratif terhadap Penanggulangan Kekerasan Pada Anak): Penerbit Scopindo Media Pustaka.
- Joko Pramono. S. Sos., M.Si. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kota Surakarta: Penerbit UNISRI Press.
- Kemen PPPA RI. 2021. Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak. Jakarta. 121 hlm.
- Prof. Dr. Conny R. Semiawan. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Penerbit Grasido.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Agung A, Ari I, Dewi A., (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Melalui Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Bali. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Ali, Mahsun., & Suwandi. (2019). Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak. Jombang.
- Ariska Tri Viky Andani, E. S. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/>
- Safitri, Rangkuti., Irfan, Ridwan, Maksum.(2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. Jakarta. Jurnal Ilmu Administrasi.
- Utami, T., Kusumawiranti, R., & Mali, M.G. (2021). Implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN Lempuyangwangi Kota Yogyakarta. Populika Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 9, No. 2, hal: 1-12
- Wuryandani W. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. Yogyakarta. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan.
- Yosada K, Kurniati A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. Sintang. Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar.

Peraturan perundang-undangan:

- Pasal 28 huruf B ayat (2) UUD NRI 1945.
- Peraturan Pemerintah PPPA No 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 tentang Perlindungan Anak.